

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi:

- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju : Bandung.
- _____, 2008, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, CV Mandar Maju : Bandung.
- Adhyakso Wahyu dkk, *Jaminan Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Menurut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Dalam Sengketa Pertanahan*, UNTAG, Surabaya, Jurnal Akrab, Volume 5 Nomor 1 Edisi 202
- Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Arje Tehupeior, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses : Jakarta.
- Darwin Ginting, 2010, *Hukum Kepemilikan Atas Tanah*, Ghalia Indonesia : Bogor.
- M. Philipus Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu : Surabaya.
- M. Yamin Lubis, dan Abd. Rahim Lubis, 2012, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Mandar Maju : Bandung.
- Oloan Sitorus, dan HM. Zaki Sierrad, 2006, *Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
- Rina Yulianti, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, Scopindo Media Pustaka : Surabaya.
- Sadpri Pansariang, Juosfiel, Ags-Okt/2014, *Proses dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah di Indonesia Lex Privatum*, Vol.II/No. 3.
- Samun Ismaya, 2019, *Penyelesaian Kasus Pertanahan*, Suluh Media : Yogyakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty : Yogyakarta.
- Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius : Yogyakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana : Jakarta.

Waskito dan Arnowo, Hadi, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Kencana : Jakarta.

Yonatan Parmahan Sibuea, Harris, November 2011, *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*, Negara Hukum : Vol. 2, No. 2.

Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika : Jakarta.

B. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

Komisi nasional hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia di bidang kepemilikan tanah. Jakarta : Komnas Ham. 2005.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Sesuai Pasal 24 (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pengumuman data fisik dan data yuridis untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah selama 14 hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

peraturan menteri agrarian dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

C. Internet:

Fallahnda, Balqis, "Cara, Alur, Syarat Mengurus Sertifikat Tanah di BPN."
diakses pada 17 april 2023, <https://tirto.id/cara-alur-dan-syarat-mengurus-sertifikat-tanah-di-bpn-fZcA>